

BUKTI KORESPONDENSI
ARTIKEL JURNAL TERAKREDITASI

Judul artikel : Law Enforcement Factors in Waste Management to Achieve Environmental Sustainability and Community Welfare
Jurnal : Substantive Justice International Journal of Law.
Volume 4, Issue 1, June 2021: 15-24.
Penulis : Suwari Akhmaddhian, Ria Virgianti dan Erga Yuhandra

No.	Perihal	Tanggal
1.	Bukti konfirmasi submit artikel dan artikel yang disubmit	18 Desember 2020
2.	Bukti konfirmasi review dan hasil review pertama	26 April 2021
3.	Bukti konfirmasi submit revisi pertama, respon kepada reviewer, dan artikel yang diresubmit	3 Mei 2021
4.	Bukti konfirmasi artikel accepted	23 Mei 2021
5.	Bukti konfirmasi artikel published online	30 Juni 2021

**1. Bukti Konfirmasi Submit Artikel dan Artikel
yang Disubmit
(18 Desember 2020)**



substantive.justice@umi.ac.id



- Tulis
- Kotak Masuk 3.802
- Berbintang
- Ditunda
- Terkirim
- Draf
- Selengkapnya

Label

[SJJL] Submission Acknowledgement Eksternal Kotak Masuk x



Aan Aswari <substantive.justice@umi.ac.id>
kepada saya

Jt

Inggris Indonesia [Terjemahkan pesan](#)

Suwari Akhmaddhian:

Thank you for submitting the manuscript, "The Effectiveness of Regional Government Policies on Waste Management 1 Environmental Sustainability and Community Welfare" to Substantive Justice International Journal of Law. With the onli are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Submission URL: <https://substantivejustice.id/index.php/sucila/authorDashboard/submission/109>
Username: suwari654321

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Aan Aswari

[Substantive Justice International Journal of Law](#)

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah untuk Mewujudkan Keadilan Ekologis, Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Abstract. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang berbasis nilai keadilan ekologis untuk mewujudkan kelestarian alam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan data primer wawancara dan observasi dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sampah, penelitian dilakukan di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah di Ciamis dalam pengelolaan sampah sudah dilengkapi dengan peraturan daerah, aparat pemerintah, sarana prasarana dan partisipasi masyarakat serta inovasi program yaitu pilah sampah, bank sampah, maggot dan sedekah sampah. Simpulannya bahwa kebijakan pemerintah daerah khususnya di Kuningan perlu adanya perbaikan terkait dengan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam kelembagaan dan pendanaan pengelolaan sampah dan peningkatan edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang baik dapat mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Effectiveness; Waste Management; Environmental Sustainability.

1. Introduction

Lingkungan yang sehat dan baik merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi dan tujuan bernegara. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya (Candrakirana, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dimana definisi sampah adalah bahan yang tidak diperlukan atau sisa dari keperluan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat (Akhmaddhian, Regional Government Policy in Environmental-Based Waste Management, 2020). Pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia berimplikasi langsung pada pengelolaan lingkungan hidup. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 305,65 juta pada tahun 2035, dan 75 persen tinggal di perkotaan (Agustina, 2019). Kondisi ini menuntut para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan

dan penanganan sampah. Adapun sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Selama ini, pengelolaan sampah pada kawasan perkotaan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah yang tinggi, kepedulian masyarakat (*human behaviour*) yang masih rendah, serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena daerah-daerah kabupaten atau kota juga mengalami berbagai hambatan. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah yang terkait dengan penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan, terutama dalam penerapan sanksinya. (Iskandar, 2019)

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis merupakan tantangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pengelolaan sampah yang tepat dan berwawasan lingkungan belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Dari berbagai masalah yang ada, dapat diidentifikasi dua hal yang penting, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sampah dan sanksi hukumnya belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik dan Kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang tepat dan berwawasan lingkungan masih rendah. (Iskandar, 2019) Pengelolaan sampah yang baik akan menghasilkan lingkungan hidup yang lestari sesuai dengan tujuan konstitusi negara Indonesia adalah mendapatkan lingkungan sehat dan baik (Akhmaddhian, *The government policy on the conservation of natural resources and ecosystems in Kuningan, Indonesia*, 2019)

Persoalan sampah di Kabupaten Kuningan saat ini makin serius untuk ditangani karena dalam sehari sampah yang dihasilkan warga hampir mencapai 400 ton. Baik limbah rumah tangga maupun yang dihasilkan dunia usaha. Sementara pengangkutan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciniru terkendala armada yang jumlahnya tidak seimbang, sampah-sampah tersebut masih didominasi plastik yang sangat sulit untuk diurai. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengurai sampah plastik yang jumlahnya mencapai ratusan ton tersebut. Dari 400 ton tersebut yang bisa tercover oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya 70 ton sampah, sisanya sebanyak 330 ton sampah di Kuningan tidak terurai, ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah dalam mengatasinya (Akhmaddhian, *Regional Government Policy in Environmental-Based Waste Management*, 2020)

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten yang diprioritaskan menjadi pusat pengembangan pengolahan limbah sampah. Program pengolahan sampah di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Ciamis didasari oleh tingginya produksi sampah masyarakat pada berbagai kalangan, baik sampah industri, maupun sampah domestik rumah tangga. Pengolahan sampah di Kabupaten Ciamis sangat diperlukan mengingat akan terbatasnya prasarana dan sarana pengolahan sampah yang ada di daerah sekitar yang tidak mampu memuat pengolahan sampah yang ada. Data dari Dinas Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Ciamis tahun 2016 menunjukkan bahwa minimnya tempat pengolahan sampah akhir dan minimnya pengetahuan warga akan pemilahan sampah (organik dan anorganik). (Mujiono, 2018)

2. Methodology

This study employed a mixed method, namely qualitative and quantitative method. This study was conducted in Kuningan Regency and Ciamis Regency, Indonesia. There were two types of data in this study; primary data which were collected through interview and observation, and secondary data which were collected through literature study in the form of primary and secondary legal materials (Puspita, Law Enforcement Model in Community Based Waste Monitoring and Management as a Realization of Good Environmental Governance Principle in West Sumatra, Indonesia, 2019). The primary data were collected by conducting interview sessions with the society around the Kuningan and Ciamis, with the related institutions, and with some stakeholders. In addition, observation was also done directly to the local society. Meanwhile, secondary data were obtained by conducting literature study towards the collection of the related primary and secondary legal materials. Here, the primary legal materials are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management as well as other relevant regulations. Whereas, the secondary legal materials are in the form of books, magazines, scientific papers, and articles as well as experts' opinions related to the government policy on the waste management and the conservation of natural resources and ecosystems. The data collected from field study and literature study were then analyzed by using descriptive analysis method. This method was used in order to provide comprehensive and deep understanding concerning the issue which can then be used as a basis for providing input or suggestions (Akhmaddhian, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 2016)

3. Result and Discussion

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Nilai Keadilan Ekologis di Kabupaten Ciamis sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, letaknya di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Banjar dan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat – Provinsi Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis – Cirebon – Jawa Tengah (BPS, 2019)

Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 terbagi menjadi 27 Kecamatan, 257 Desa, 7 Kelurahan, 1.225 Dusun, 8.747 Rukun Warga (RW) dan 2.825 Rukun Tetangga (RT). Di Kabupaten Ciamis jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Panawangan sebanyak 18 desa dan jumlah desa terkecilnya terdapat di Kecamatan Cimaragas, Ciamis, dan Sukamantri masing-masing sebanyak 5 desa. Jumlah Rukun Tetangga (RT) Kecamatan Rancah menduduki peringkat pertama sebanyak 194 RT. Jumlah PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebanyak 10.676 orang pada Tahun 2018. Proyeksi penduduk bertujuan sebagai informasi untuk pengambilan kebijakan di masa datang untuk memperoleh informasi penduduk dengan mengasumsikan tahun mendatang. Proyeksi Penduduk Kabupaten Ciamis dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut, Tahun 2010

penduduk Kabupaten Ciamis sebanyak 1.135.700 jiwa, hasil proyeksi Tahun 2019 sebanyak 1.195.200 jiwa. (Satria, 2019)

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menangani masalah sampah menjadi bahan rujukan bagi Kabupaten atau kota lain di Jawa Barat, salah satunya Kabupaten Kuningan. Bahkan dari Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah melakukan studi banding ke Ciamis terkait pengelolaan sampahnya. Saat kabupaten Ciamis dijadikan lokasi studi banding, bukan berarti Kabupaten Ciamis bebas dari permasalahan sampah bahkan produksi sampahnya cukup besar diperkirakan mencapai 560 ton perhari. Seperti Kabupaten Kuningan, sebagian produksi sampah terbesar berasal dari sampah rumah tangga. Kabupaten Ciamis memiliki 2 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), diantaranya (Sarwono, 2020) :

- a. Tempat Pemrosesan Akhir Handapherang, Kecamatan Cijeungjing yang memiliki luas total 9 Ha, yang baru dimanfaatkan untuk pembuangan sampah dan fasilitas lainnya baru sekitar 3 Ha. Namun pada tahun 2018 TPA handapherang resmi di tutup total, penutupan tersebut merupakan dampak dari proyek pembangunan bendungan leuwikeris, karena lokasi TPA handapherang berada tidak jauh dari sungai Citanduy, kemudian untuk aktifitas pembuangan sampah di pindah ke TPA Sindangrasa, kendala yang dihadapi yaitu karena jarak ke TPA Sindangrasa terlalu jauh mencapai 40 kilometer dari Kota Ciamis, kendala lainnya keterbatasan armada.
- b. Tempat Pemrosesan Akhir Sindangrasa, Kecamatan Banjaranyar didirikan pada tahun 2017, memiliki luas 3,40 Hektar. Jumlah sampah yang dapat dikelola 34 ton perhari, untuk sistem operasi yang digunakan di TPA Sindangrasa adalah *sanitary landfill*, TPA Sindangrasa memiliki fasilitas penunjang yang cukup lengkap terdapat sumur pantau dan lindi. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah organik dikelola dengan bekerja sama dengan Kelompok Tani Rumpaka Alam dengan pengembangan padi organik.

Kabupaten Ciamis memiliki visi 2020 menuju Ciamis bebas sampah (*Zero Waste*). Untuk dapat mewujudkan visi tersebut Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah mengembangkan program sebagai berikut (Sarwono, 2020) :

- a. Pilah sampah dari rumah, program ini berjalan dengan baik karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Ciamis sudah menerapkan pilah sampah dari rumah sebelum di buang, hal itu terlihat dari tidak adanya sampah yang berserakan di sekitar wilayah Kota Ciamis, perumahan, perkantoran, pertokoan dan fasilitas umum lainnya.
- b. Bank Sampah, untuk sampah non organik dari rumah tangga juga di kumpulkan dan disetorkan ke Bank Sampah sehingga menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat dan nantinya akan dikelola dengan prinsip 3R sehingga dapat bernilai ekonomis. Jumlah bank sampah di Kabupaten Ciamis sebanyak 120 dan ada penambahan 1 bank sampah induk yang baru diresmikan bulan juni 2020, bank sampah Ciamis ini berlokasi di Jalan Mr. Iwa Somantri Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis.

- c. Melakukan pembudidayaan dengan memanfaatkan *Black Soldier Fly* (BSF) atau Maggot, Maggot BSF (*Black Soldier Fly*) adalah larva atau biasa disebut belatung dari jenis lalat besar berwarna hitam yang terlihat seperti tawon. Maggot BSF adalah bentuk dari siklus pertama (larva) lalat hitam yang nantinya bermetamorfosa menjadi lalat dewasa. Para peternak burung, ayam, ikan, hingga lele biasanya akan memberi makan ternaknya dengan pelet, namun maggot memiliki kandungan protein tinggi yang bisa dijadikan alternatif pakan ternak. Pembudidayaan belatung ini juga menggunakan media sampah organik yang dapat mengurangi suplai sampah organik yang selama ini terkadang menjadi permasalahan lingkungan. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai budidaya maggot, karena ini merupakan salah satu cara untuk menangani limbah sampah organik dengan merubahnya menjadi pakan ternak bahkan sejumlah petani ternak ikan di wilayah Pawindan, Panumbangan dan Banjaranyar sudah mulai menjalankan budidaya maggot, untuk cara pembudidayaannya cukup mudah yaitu simpan bibit telur maggot di kolam kecil berisi sampah organik yang busuk, lalu biarkan selama 18 hari, maggot siap dipanen, jika ingin di budidayakan biarkan maggot jadi kepompong kemudian berubah menjadi lalat dewasa.
- d. Sedekah sampah, petugas dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis sudah menyediakan keranjang sedekah sampah di beberapa fasilitas umum, masyarakat akan memasukan sampah anorganik seperti botol bekas minuman, gelas plastik dan sebagainya ke keranjang sedekah sampah, kemudian petugas akan mengambil keranjang tersebut ke bank sampah untuk di konversi dengan uang, selanjutnya akan di setorkan ke Badan Amil Zakat Kabupaten Ciamis. Program ini dapat membantu mengurangi sampah karena masyarakat dapat menyumbangkan sampah sambil beramal sehingga lingkungan sekitar terlihat bersih dan asri.

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil analisis penelitian di lapangan yaitu (Soekanto, 2014) :

- a. Faktor hukumnya yaitu undang-undang, dalam pengaturan perundang-undangan di Indonesia terkait pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan berbagai peraturan penunjang lainnya termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, sudah maksimal mengatur mulai dari ruang lingkup pengelolaan sampah, asas dan tujuan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, jasa pelayanan sampah, ketentuan

perizinan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan larangan, dan berbagai ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah

- b. Penegak Hukum, yaitu PPNS, polisi, hakim, jaksa, satpol PP. Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup belum merata dan menyeluruh antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, proses sosialisasi terhadap masyarakat baik itu tentang Peraturan Daerah maupun tentang penanganan sampah. Pemerintah Kabupaten Kuningan berusaha menawarkan konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menerapkan prinsip 3R (*Recycle, Reuse* dan *Reduce*) melalui kegiatan Kuningan pembentukan kelompok bank sampah kepada beberapa desa atau kelurahan di Kabupaten Kuningan namun belum merata, diikuti komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dari sisi pendanaan kegiatan awal untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan. Proses sosialisasi sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah meliputi proses penyampaian ide/gagasan dari pemerintah kepada masyarakat, yang diwakili oleh pengurus RT/RW, Kader Lingkungan, pengurus PKK, tokoh masyarakat, dan tokoh keagamaan. Selanjutnya sosialisasi kepada warga masyarakat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, misalnya disampaikan dalam pertemuan rutin PKK, pertemuan dasawisma, pengajian ibu-ibu, serta pertemuan isidental antara warga dan pengurus RT/RW yang khusus membahas sosialisasi teknis pengelolaan sampah. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sudah maksimal dan terus melakukan pembenahan di bidang pengelolaan sampah, sosialisasi terus diupayakan sehingga masyarakat sudah mulai terbiasa dengan memilah sampah dari rumah ataupun ikut serta dalam pengelolaan sampah melalui program-program pengelolaan sampah.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas penunjang pengelolaan sampah, baik itu di Kabupaten Kuningan maupun Kabupaten Ciamis sarana prasarana dalam pengelolaan sampah belum cukup memadai terutama pada anggaran. Namun yang menjadi permasalahan utama adalah Tempat Pemrosesan Akhir di Ciniru Kabupaten Kuningan masih menggunakan sistem operasi *open dumping*, sistem operasi tersebut sebetulnya sudah tidak diperbolehkan di Indonesia berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sindangrasa Kabupaten Ciamis sudah menggunakan sistem operasi *Sanitary Landfill*.
- d. Faktor Masyarakat, keberhasilan suatu peraturan tergantung pada masyarakatnya. Di Kabupaten Kuningan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan dan mengelola sampah masih kurang, hal ini terlihat pada kondisi sampah yang dibuang oleh masyarakat yang ditampung di TPS dan TPA masih tercampur, sehingga sampah yang berasal dari masyarakat dalam kondisi tercampur dalam perjalanannya sampai ke TPA tetap dalam kondisi tercampur. Sedangkan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Ciamis sudah menerapkan kebiasaan memilah sampah dari rumah dan aktif ikut serta bersama pemerintah dalam pengelolaan sampah.
- e. Faktor Kebudayaan, budaya masyarakat terlihat saat sudah disediakan tempat sampah 3R namun masih membuang sampah sembarangan. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan bentuk rasa

bersyukur sebagai makhluk hidup yang harmoni dengan alam (Hartiwiningsih, 2018). Sikap mencintai lingkungan merupakan wujud penjelmaan dari sikap yang sesuai dengan landasan ideology negara Indonesia yaitu Pancasila (Junaedi, 2019)

Berdasarkan analisis teori tersebut argumentasi penulis yaitu bahwa perlu adanya suatu ketegasan dan kebijakan dari daerah maupun pusat mengenai penegakan hukum karena paradigma masyarakat masih menganggap enteng persoalan sampah dan peraturan yang mengaturnya, *mindset* masyarakat yaitu tidak akan begitu saja di hukum hanya karena persoalan sampah, kelemahan dari kelima faktor penegakan hukum tersebut berada pada peran penegak hukum dalam melaksanakan peraturan yang sudah di tetapkan kurang efektif karena masih jarang terlihat adanya sosialisasi mengenai peraturan tentang pengelolaan sampah padahal itu sangat penting dan kemungkinan akan mempengaruhi pola perilaku masyarakat, jika sosialisasi mengenai peraturan dan pengelolaan sampah dapat berjalan efektif tentunya paradigma masyarakatpun akan berubah karena merasa terikat oleh peraturan dan akan takut untuk melakukan kesalahan terlebih dalam hal pembuangan maupun pengelolaan sampah, kemudian kelemahan selanjutnya adalah ada pada sarana dan prasarana yang masih minim karena keterbatasan anggaran hal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan sampah, selain peran masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sarana dan prasarana pun sebagai penunjang pengelolaan sampah harus di utamakan dengan kata lain sarana dan prasarana adalah senjata dalam memerangi sampah. Kemudian teori tersebut memiliki kelemahan dalam hal faktor masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan masih menjadi kendala dalam penegakan hukum. Perbaikan perlu dilakukan pada factor regulasi, sarana prasarana dan budaya masyarakat.

Keadilan lingkungan sebagai sebuah keadilan sosial berkaitan secara fungsional dan empiris dengan pembangunan berkelanjutan (Purwendah, 2019). Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan lingkungan yang baik bertujuan untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Bahwa dengan pengelolaan sampah berbasis inovasi seperti pilah sampah, bank sampah, perberedayaan maggot dan sedekah sampah merupakan inovasi yang bertujuan merubah sampah dari beban menjadi sumber pemasukan dan sumber ekonomi baru sehingga apabila pengelolaan sampah dilakukan dengan baik selain lingkungan lestari juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Conclusion

Pengaturan pengelolaan sampah di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Kabupaten Kuningan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengeolaan Sampah serta Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagai Pelaksananya sedannngkan di Kabupaten Ciamis yaitu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kabupaten Ciamis sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah

dan Pengembangan teknologi pengelolaan sampah organik dikelola dengan bekerja sama dengan Kelompok Tani Rumpaka Alam dengan pengembangan padi organik, program lainnya yaitu pilah sampah, bank sampah, maggot dan sedekah smpah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Kuningan maupun Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten perbandingan memang terlihat masih banyak kekurangan terutama pada faktor sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah serta masih minimnya kesadaran masyarakat terkait penanganan sampah menjadi masalah bahkan, karena sampah dapat berpengaruh terhadap kesehatan, kebersihan, keindahan lingkungan. Bahwa dengan pengelolaan sampah berbasis inovasi seperti pilah sampah, bank sampah, perberedayaan maggot dan sedekah sampah merupakan inovasi yang bertujuan merubah sampah dari beban menjadi sumber pemasukan dan sumber ekonomi baru sehingga apabila pengelolaan sampah dilakukan dengan baik selain lingkungan lestari juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi terkait pengelolaan saat ini belum melibatkan Pemerintah Desa secara optimal terutama terkait dengan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dan pendanaan pengelolaan sampah sehingga perlu adanya perbaikan regulasi terkait peran Pemerintah Desa dalam pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga pengelolaan sampah dapat bersumber dari berbagai sumber Anggaran serta edukasi kepada masyarakat luas terkait peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mengelola sampah sehingga yang awal mulanya sampah adalah beban menjadi berkah.

ACKNOWLEDGEMENT

The authors thank The researcher expressed their gratitude to the Directorate General Research and Development Strengthening, Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia and Government of Kuningan Regency, for permission and encouragement to conduct such studies for the benefit of science and society.

Bibliography

- Agustina, E. (2019). The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the Regional Autonomy Era. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6((1)), 34-39.
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-35.
- Akhmaddhian, S. (2019). The government policy on the conservation of natural resources and ecosystems in Kuningan, Indonesia. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* Bandung: IOP .
- Akhmaddhian, S. (2020). Regional Government Policy in Environmental-Based Waste Management. *Advances in Economics, Business and Management Research. Regional Government Policy in Environmental-Based Waste Management. Advances in Economics, Business and Management Research. Volume 140, May 2020* , p. Volume 140. Semarang: Atlantis Press.
- BPS. (2019). *Kabupaten Ciamis*. Ciamis: BPS Ciamis.

- Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta. *Yustisia*, 4(3), 581-601.
- Hartiwiningsih. (2018). The public participation in water conservation to embody food security in Kuningan, Indonesia. *Int. J. of Civ. Engineering and Tech*, 9(4), 254-264.
- Iskandar, O. (2019). Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan di Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. *Jurnal Abdimas*, Juni(2), 110-121.
- Junaedi. (2019). The The Axiology of Pancasila in the Reconstruction of Legal Culture in Indonesia. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 7-13.
- Mujiono, M. A. (2018). Iptek Bagi Masyarakat dalam Mengembangkan Kawasan Sadar Lingkungan di Desa Sindangmukti yang Mengalami Kendala Sarana Pengolahan Sampah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas)*, 1(1), 9-16.
- Purwendah, E. K. (2019). Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(2), 139-151.
- Puspita, L. (2019). Law Enforcement Model in Community Based Waste Monitoring and Management as a Realization of Good Environmental Governance Principle in West Sumatra, Indonesia. *nifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1- 6.
- Puspita, L. (2019). Law Enforcement Model in Community Based Waste Monitoring and Management as a Realization of Good Environmental Governance Principle in West Sumatra, Indonesia. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1- 6.
- Sarwono. (2020, July Monday). Penanganan Sampah di Kabupaten Ciamis.
- Satria, A. P. (2019). Environmental Quality Protection in the Period of Industrialization to Realize Environmental Based Industry. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 156 – 163.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Bukti Konfirmasi Review dan Hasil Review

Pertama

(26 April 2021)

Hasil pengulasan



Participants

Aan Aswari, AAW (aanaswari)

Suwari Akhmaddhian (suwari654321)

Messages

Note	From
<p>Salam, Artikel bapak sudah di ulas oleh reviewer, ada beberapa hal perlu di tegaskan, namun kami harap nanti bapak mengembalikan artikel bapak sesuai dengan template yang kami sediakan, termasuk gaya kutipan yang kami berlakukan. Mohon untuk membantu kami benar2 dalam melakukan perbaikan agar kami dapat menjaga kualitas publikasi ilmiah kami. Hasil perbaikan bapak kami tunggu paling lambat 3 Mei 2021. Mengabaikan waktu yang telah kami tentukan mungkin akan menghambat proses artikel bapak pada jurnal kami. Mengembalikan naskah dengan membalas pesan ini dan file anda dapat diupload dibagian bawah balasan pesan bapak. Terima kasih</p> <p><input type="checkbox"/> editor 1, 109-828-1-5-20210419.docx</p> <p><input type="checkbox"/> editor 2, 109-827-1-5-20210419.docx</p>	<p>aanaswari Apr 26</p>
<p>▶ Yth. Pengelola Jurnal Substantive Justice International Journal</p> <p>Terlampir hasil perbaikan</p> <p>Salam, Suwari Akhmaddhian</p> <p><input type="checkbox"/> suwari654321, Author, Perbaikan SJ.docx</p>	<p>suwari654321 May 03</p>

[Add Message](#)

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah untuk Mewujudkan Keadilan Ekologis, Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Commented [MOU1]: Kurang relevan dengan pembahasan, karena pembahasan lebih banyak mengarah pada penegakan hukum.

Abstract. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang berbasis nilai keadilan ekologis untuk mewujudkan kelestarian alam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan data primer wawancara dan observasi dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sampah, penelitian dilakukan di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah di Ciamis dalam pengelolaan sampah sudah dilengkapi dengan peraturan daerah, aparat pemerintah, sarana prasarana dan partisipasi masyarakat serta inovasi program yaitu pilah sampah, bank sampah, maggot dan sedekah sampah. Simpulannya bahwa kebijakan pemerintah daerah khususnya di Kuningan perlu adanya perbaikan terkait dengan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam kelembagaan dan pendanaan pengelolaan sampah dan peningkatan edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang baik dapat mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Commented [MOU2]: Unsur dari sebuah abstrak adalah meliputi latar belakang, permasalahan, metode penelitian dan hasil penelitian.

Kata Kunci : Effectiveness; Waste Management; Environmental Sustainability.

1. Introduction

Lingkungan yang sehat dan baik merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi dan tujuan bernegara. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya (Candrakirana, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dimana definisi sampah adalah bahan yang tidak diperlukan atau sisa dari keperluan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat (Akhmaddhian, Regional Government Policy in Environmental-Based Waste Management, 2020). Pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia berimplikasi langsung pada pengelolaan lingkungan hidup. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 305,65 juta pada tahun 2035, dan 75 persen tinggal di perkotaan (Agustina, 2019). Kondisi ini menuntut para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan

Commented [MOU3]: Tidak tampak adanya gap antara data eksis dengan urgensi Perda atau kebijakan Pemda lainnya dalam pengolahan sampah. Dalam latar belakang ini belum tampak permasalahan yang akan diangkat sesuai dengan Judul atau tema.

dan penanganan sampah. Adapun sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Selama ini, pengelolaan sampah pada kawasan perkotaan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah yang tinggi, kepedulian masyarakat (*human behaviour*) yang masih rendah, serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena daerah-daerah kabupaten atau kota juga mengalami berbagai hambatan. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah yang terkait dengan penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan, terutama dalam penerapan sanksinya. (Iskandar, 2019)

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis merupakan tantangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pengelolaan sampah yang tepat dan berwawasan lingkungan belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Dari berbagai masalah yang ada, dapat diidentifikasi dua hal yang penting, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sampah dan sanksi hukumnya belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik dan Kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang tepat dan berwawasan lingkungan masih rendah. (Iskandar, 2019) Pengelolaan sampah yang baik akan menghasilkan lingkungan hidup yang lestari sesuai dengan tujuan konstitusi negara Indonesia adalah mendapatkan lingkungan sehat dan baik (Akhmaddhian, The government policy on the conservation of natural resources and ecosystems in Kuningan, Indonesia, 2019)

Persoalan sampah di Kabupaten Kuningan saat ini makin serius untuk ditangani karena dalam sehari sampah yang dihasilkan warga hampir mencapai 400 ton. Baik limbah rumah tangga maupun yang dihasilkan dunia usaha. Sementara pengangkutan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciniru terkendala armada yang jumlahnya tidak seimbang, sampah-sampah tersebut masih didominasi plastik yang sangat sulit untuk diurai. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengurai sampah plastik yang jumlahnya mencapai ratusan ton tersebut. Dari 400 ton tersebut yang bisa tercover oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya 70 ton sampah, sisanya sebanyak 330 ton sampah di Kuningan tidak terurai, ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah dalam mengatasinya (Akhmaddhian, Regional Government Policy in Environmental-Based Waste Management, 2020)

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten yang diprioritaskan menjadi pusat pengembangan pengolahan limbah sampah. Program pengolahan sampah di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Ciamis didasari oleh tingginya produksi sampah masyarakat pada berbagai kalangan, baik sampah industri, maupun sampah domestik rumah tangga. Pengolahan sampah di Kabupaten Ciamis sangat diperlukan mengingat akan terbatasnya prasarana dan sarana pengolahan sampah yang ada di daerah sekitar yang tidak mampu memuat pengolahan sampah yang ada. Data dari Dinas Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Ciamis tahun 2016 menunjukkan bahwa minimnya tempat pengolahan sampah akhir dan minimnya pengetahuan warga akan pemilahan sampah (organik dan anorganik). (Mujiono, 2018)

2. Methodology

This study employed a mixed method, namely qualitative and quantitative method. This study was conducted in Kuningan Regency and Ciamis Regency, Indonesia. There were two types of data in this study; primary data which were collected through interview and observation, and secondary data which were collected through literature study in the form of primary and secondary legal materials (Puspita, Law Enforcement Model in Community Based Waste Monitoring and Management as a Realization of Good Environmental Governance Principle in West Sumatra, Indonesia, 2019). The primary data were collected by conducting interview sessions with the society around the Kuningan and Ciamis, with the related institutions, and with some stakeholders. In addition, observation was also done directly to the local society. Meanwhile, secondary data were obtained by conducting literature study towards the collection of the related primary and secondary legal materials. Here, the primary legal materials are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management as well as other relevant regulations. Whereas, the secondary legal materials are in the form of books, magazines, scientific papers, and articles as well as experts' opinions related to the government policy on the waste management and the conservation of natural resources and ecosystems. The data collected from field study and literature study were then analyzed by using descriptive analysis method. This method was used in order to provide comprehensive and deep understanding concerning the issue which can then be used as a basis for providing input or suggestions (Akhmaddhian, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 2016)

3. Result and Discussion

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Nilai Keadilan Ekologis di Kabupaten Ciamis sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, letaknya di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Banjar dan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat – Provinsi Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis – Cirebon – Jawa Tengah (BPS, 2019)

Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 terbagi menjadi 27 Kecamatan, 257 Desa, 7 Kelurahan, 1.225 Dusun, 8.747 Rukun Warga (RW) dan 2.825 Rukun Tetangga (RT). Di Kabupaten Ciamis jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Panawangan sebanyak 18 desa dan jumlah desa terkecilnya terdapat di Kecamatan Cimaragas, Ciamis, dan Sukamantri masing-masing sebanyak 5 desa. Jumlah Rukun Tetangga (RT) Kecamatan Rancah menduduki peringkat pertama sebanyak 194 RT. Jumlah PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebanyak 10.676 orang pada Tahun 2018. Proyeksi penduduk bertujuan sebagai informasi untuk pengambilan kebijakan di masa datang untuk memperoleh informasi penduduk dengan mengasumsikan tahun mendatang. Proyeksi Penduduk Kabupaten Ciamis dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut, Tahun 2010

Commented [MOU4]: Perjelas mengapa menggunakan metode ini karena kenyataannya metode ini sangat jarang digunakan dalam penelitian hukum. Kemudian jelaskan juga konsep dari kedua metode penelitian tersebut.
Metode kuantitatif pengumpulan datanya pasti melalui kuisioner dan tabulasi data, dalam metode yang dituliskan ini tidak ditemukan.

penduduk Kabupaten Ciamis sebanyak 1.135.700 jiwa, hasil proyeksi Tahun 2019 sebanyak 1.195.200 jiwa. (Satria, 2019)

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menangani masalah sampah menjadi bahan rujukan bagi Kabupaten atau kota lain di Jawa Barat, salah satunya Kabupaten Kuningan. Bahkan dari Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah melakukan studi banding ke Ciamis terkait pengelolaan sampahnya. Saat kabupaten Ciamis dijadikan lokasi studi banding, bukan berarti Kabupaten Ciamis bebas dari permasalahan sampah bahkan produksi sampahnya cukup besar diperkirakan mencapai 560 ton perhari. Seperti Kabupaten Kuningan, sebagian produksi sampah terbesar berasal dari sampah rumah tangga. Kabupaten Ciamis memiliki 2 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), diantaranya (Sarwono, 2020) :

- a. Tempat Pemrosesan Akhir Handapherang, Kecamatan Cijeungjing yang memiliki luas total 9 Ha, yang baru dimanfaatkan untuk pembuangan sampah dan fasilitas lainnya baru sekitar 3 Ha. Namun pada tahun 2018 TPA handapherang resmi di tutup total, penutupan tersebut merupakan dampak dari proyek pembangunan bendungan leuwikeris, karena lokasi TPA handapherang berada tidak jauh dari sungai Citanduy, kemudian untuk aktifitas pembuangan sampah di pindah ke TPA Sindangrasa, kendala yang dihadapi yaitu karena jarak ke TPA Sindangrasa terlalu jauh mencapai 40 kilometer dari Kota Ciamis, kendala lainnya keterbatasan armada.
- b. Tempat Pemrosesan Akhir Sindangrasa, Kecamatan Banjaranyar didirikan pada tahun 2017, memiliki luas 3,40 Hektar. Jumlah sampah yang dapat dikelola 34 ton perhari, untuk sistem operasi yang digunakan di TPA Sindangrasa adalah *sanitary landfill*, TPA Sindangrasa memiliki fasilitas penunjang yang cukup lengkap terdapat sumur pantau dan lindi. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah organik dikelola dengan bekerja sama dengan Kelompok Tani Rumpaka Alam dengan pengembangan padi organik.

Kabupaten Ciamis memiliki visi 2020 menuju Ciamis bebas sampah (*Zero Waste*). Untuk dapat mewujudkan visi tersebut Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah mengembangkan program sebagai berikut (Sarwono, 2020) :

- a. Pilah sampah dari rumah, program ini berjalan dengan baik karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Ciamis sudah menerapkan pilah sampah dari rumah sebelum di buang, hal itu terlihat dari tidak adanya sampah yang berserakan di sekitar wilayah Kota Ciamis, perumahan, perkantoran, pertokoan dan fasilitas umum lainnya.
- b. Bank Sampah, untuk sampah non organik dari rumah tangga juga di kumpulkan dan disetorkan ke Bank Sampah sehingga menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat dan nantinya akan dikelola dengan prinsip 3R sehingga dapat bernilai ekonomis. Jumlah bank sampah di Kabupaten Ciamis sebanyak 120 dan ada penambahan 1 bank sampah induk yang baru diresmikan bulan juni 2020, bank sampah Ciamis ini berlokasi di Jalan Mr. Iwa Somantri Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis.

- c. Melakukan pembudidayaan dengan memanfaatkan *Black Soldier Fly* (BSF) atau Maggot, Maggot BSF (*Black Soldier Fly*) adalah larva atau biasa disebut belatung dari jenis lalat besar berwarna hitam yang terlihat seperti tawon. Maggot BSF adalah bentuk dari siklus pertama (larva) lalat hitam yang nantinya bermetamorfosa menjadi lalat dewasa. Para peternak burung, ayam, ikan, hingga lele biasanya akan memberi makan ternaknya dengan pelet, namun maggot memiliki kandungan protein tinggi yang bisa dijadikan alternatif pakan ternak. Pembudidayaan belatung ini juga menggunakan media sampah organik yang dapat mengurangi suplai sampah organik yang selama ini terkadang menjadi permasalahan lingkungan. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai budidaya maggot, karena ini merupakan salah satu cara untuk menangani limbah sampah organik dengan merubahnya menjadi pakan ternak bahkan sejumlah petani ternak ikan di wilayah Pawindan, Panumbangan dan Banjarnayar sudah mulai menjalankan budidaya maggot, untuk cara pembudidayaannya cukup mudah yaitu simpan bibit telur maggot di kolam kecil berisi sampah organik yang busuk, lalu biarkan selama 18 hari, maggot siap dipanen, jika ingin di budidayakan biarkan maggot jadi kepompong kemudian berubah menjadi lalat dewasa.
- d. Sedekah sampah, petugas dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis sudah menyediakan keranjang sedekah sampah di beberapa fasilitas umum, masyarakat akan memasukan sampah anorganik seperti botol bekas minuman, gelas plastik dan sebagainya ke keranjang sedekah sampah, kemudian petugas akan mengambil keranjang tersebut ke bank sampah untuk di konversi dengan uang, selanjutnya akan di setorkan ke Badan Amil Zakat Kabupaten Ciamis. Program ini dapat membantu mengurangi sampah karena masyarakat dapat menyumbangkan sampah sambil beramal sehingga lingkungan sekitar terlihat bersih dan asri.

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil analisis penelitian di lapangan yaitu (Soekanto, 2014) :

- a. Faktor hukumnya yaitu undang-undang, dalam pengaturan perundang-undangan di Indonesia terkait pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan berbagai peraturan penunjang lainnya termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, sudah maksimal mengatur mulai dari ruang lingkup pengelolaan sampah, asas dan tujuan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, jasa pelayanan sampah, ketentuan

perizinan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan larangan, dan berbagai ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah

- b. Penegak Hukum, yaitu PPNS, polisi, hakim, jaksa, satpol PP. Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup belum merata dan menyeluruh antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, proses sosialisasi terhadap masyarakat baik itu tentang Peraturan Daerah maupun tentang penanganan sampah. Pemerintah Kabupaten Kuningan berusaha menawarkan konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menerapkan prinsip 3R (*Recycle*, *Reuse* dan *Reduce*) melalui kegiatan Kuningan pembentukan kelompok bank sampah kepada beberapa desa atau kelurahan di Kabupaten Kuningan namun belum merata, diikuti komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dari sisi pendanaan kegiatan awal untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan. Proses sosialisasi sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah meliputi proses penyampaian ide/gagasan dari pemerintah kepada masyarakat, yang diwakili oleh pengurus RT/RW, Kader Lingkungan, pengurus PKK, tokoh masyarakat, dan tokoh keagamaan. Selanjutnya sosialisasi kepada warga masyarakat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, misalnya disampaikan dalam pertemuan rutin PKK, pertemuan dasawisma, pengajian ibu-ibu, serta pertemuan isidental antara warga dan pengurus RT/RW yang khusus membahas sosialisasi teknis pengelolaan sampah. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sudah maksimal dan terus melakukan pembenahan di bidang pengelolaan sampah, sosialisasi terus diupayakan sehingga masyarakat sudah mulai terbiasa dengan memilah sampah dari rumah ataupun ikut serta dalam pengelolaan sampah melalui program-program pengelolaan sampah.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas penunjang pengelolaan sampah, baik itu di Kabupaten Kuningan maupun Kabupaten Ciamis sarana prasarana dalam pengelolaan sampah belum cukup memadai terutama pada anggaran. Namun yang menjadi permasalahan utama adalah Tempat Pemrosesan Akhir di Ciniru Kabupaten Kuningan masih menggunakan sistem operasi *open dumping*, sistem operasi tersebut sebetulnya sudah tidak diperbolehkan di Indonesia berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sindangrasa Kabupaten Ciamis sudah menggunakan sistem operasi *Sanitary Landfill*.
- d. Faktor Masyarakat, keberhasilan suatu peraturan tergantung pada masyarakatnya. Di Kabupaten Kuningan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan dan mengelola sampah masih kurang, hal ini terlihat pada kondisi sampah yang dibuang oleh masyarakat yang ditampung di TPS dan TPA masih tercampur, sehingga sampah yang berasal dari masyarakat dalam kondisi tercampur dalam perjalanannya sampai ke TPA tetap dalam kondisi tercampur. Sedangkan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Ciamis sudah menerapkan kebiasaan memilah sampah dari rumah dan aktif ikut serta bersama pemerintah dalam pengelolaan sampah.
- e. Faktor Kebudayaan, budaya masyarakat terlihat saat sudah disediakan tempat sampah 3R namun masih membuang sampah sembarangan. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan bentuk rasa

bersyukur sebagai makhluk hidup yang harmoni dengan alam (Hartiwiningsih, 2018). Sikap mencintai lingkungan merupakan wujud penjelmaan dari sikap yang sesuai dengan landasan ideology negara Indonesia yaitu Pancasila (Junaedi, 2019)

Berdasarkan analisis teori tersebut argumentasi penulis yaitu bahwa perlu adanya suatu ketegasan dan kebijakan dari daerah maupun pusat mengenai penegakan hukum karena paradigma masyarakat masih menganggap enteng persoalan sampah dan peraturan yang mengaturnya, *mindset* masyarakat yaitu tidak akan begitu saja di hukum hanya karena persoalan sampah, kelemahan dari kelima faktor penegakan hukum tersebut berada pada peran penegak hukum dalam melaksanakan peraturan yang sudah di tetapkan kurang efektif karena masih jarang terlihat adanya sosialisasi mengenai peraturan tentang pengelolaan sampah padahal itu sangat penting dan kemungkinan akan mempengaruhi pola perilaku masyarakat, jika sosialisasi mengenai peraturan dan pengelolaan sampah dapat berjalan efektif tentunya paradigma masyarakatpun akan berubah karena merasa terikat oleh peraturan dan akan takut untuk melakukan kesalahan terlebih dalam hal pembuangan maupun pengelolaan sampah, kemudian kelemahan selanjutnya adalah ada pada sarana dan prasarana yang masih minim karena keterbatasan anggaran hal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan sampah, selain peran masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sarana dan prasarana pun sebagai penunjang pengelolaan sampah harus di utamakan dengan kata lain sarana dan prasarana adalah senjata dalam memerangi sampah. Kemudian teori tersebut memiliki kelemahan dalam hal faktor masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan masih menjadi kendala dalam penegakan hukum. Perbaikan perlu dilakukan pada factor regulasi, sarana prasarana dan budaya masyarakat.

Keadilan lingkungan sebagai sebuah keadilan sosial berkaitan secara fungsional dan empiris dengan pembangunan berkelanjutan (Purwendah, 2019). Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan lingkungan yang baik bertujuan untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Bahwa dengan pengelolaan sampah berbasis inovasi seperti pilah sampah, bank sampah, perberedayaan maggot dan sedekah sampah merupakan inovasi yang bertujuan merubah sampah dari beban menjadi sumber pemasukan dan sumber ekonomi baru sehingga apabila pengelolaan sampah dilakukan dengan baik selain lingkungan lestari juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Conclusion

Pengaturan pengelolaan sampah di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Kabupaten Kuningan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengeolaan Sampah serta Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagai Pelaksananya sedannngkan di Kabupaten Ciamis yaitu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kabupaten Ciamis sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah

Commented [MOU5]: Tambahkan penjelasan mengenai pembuktian bahwa kebijakan pemda penting untuk mendorong efektifitas pengelolaan sampah ...dst, jadi ada analisis antara ada dan tidak ada kebijakan pemda pengolahan sampah, sehingga bisa tampak efektifitasnya

Commented [MOU6]: Tidak sinkron dengan judul, yaitu mengenai efektifitas dst... harusnya di kesimpulan sudah langsung terjawab bagaimanakah efektifitasdst

dan Pengembangan teknologi pengelolaan sampah organik dikelola dengan bekerja sama dengan Kelompok Tani Rumpaka Alam dengan pengembangan padi organik, program lainnya yaitu pilah sampah, bank sampah, maggot dan sedekah smpah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Kuningan maupun Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten perbandingan memang terlihat masih banyak kekurangan terutama pada faktor sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah serta masih minimnya kesadaran masyarakat terkait penanganan sampah menjadi masalah bahkan, karena sampah dapat berpengaruh terhadap kesehatan, kebersihan, keindahan lingkungan. Bahwa dengan pengelolaan sampah berbasis inovasi seperti pilah sampah, bank sampah, perberedayaan maggot dan sedekah sampah merupakan inovasi yang bertujuan merubah sampah dari beban menjadi sumber pemasukan dan sumber ekonomi baru sehingga apabila pengelolaan sampah dilakukan dengan baik selain lingkungan lestari juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi terkait pengelolaan saat ini belum melibatkan Pemerintah Desa secara optimal terutama terkait dengan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dan pendanaan pengelolaan sampah sehingga perlu adanya perbaikan regulasi terkait peran Pemerintah Desa dalam pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga pengelolaan sampah dapat bersumber dari berbagai sumber Anggaran serta edukasi kepada masyarakat luas terkait peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mengelola sampah sehingga yang awal mulanya sampah adalah beban menjadi berkah.

ACKNOWLEDGEMENT

The authors thank The researcher expressed their gratitude to the Directorate General Research and Development Strengthening, Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia and Government of Kuningan Regency, for permission and encouragement to conduct such studies for the benefit of science and society.

Bibliography

- Agustina, E. (2019). The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the Regional Autonomy Era. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6((1)), 34-39.
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-35.
- Akhmaddhian, S. (2019). The government policy on the conservation of natural resources and ecosystems in Kuningan, Indonesia. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* Bandung: IOP .
- Akhmaddhian, S. (2020). Regional Government Policy in Environmental-Based Waste Management. *Advances in Economics, Business and Management Research. Regional Government Policy in Environmental-Based Waste Management. Advances in Economics, Business and Management Research. Volume 140, May 2020* , p. Volume 140. Semarang: Atlantis Press.
- BPS. (2019). *Kabupaten Ciamis*. Ciamis: BPS Ciamis.

- Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta. *Yustisia*, 4(3), 581-601.
- Hartiwiningsih. (2018). The public participation in water conservation to embody food security in Kuningan, Indonesia. *Int. J. of Civ. Engineering and Tech*, 9(4), 254-264.
- Iskandar, O. (2019). Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan di Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. *Jurnal Abdimas*, Juni(2), 110-121.
- Junaedi. (2019). The The Axiology of Pancasila in the Reconstruction of Legal Culture in Indonesia. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6((1)), 7-13.
- Mujiono, M. A. (2018). Iptek Bagi Masyarakat dalam Mengembangkan Kawasan Sadar Lingkungan di Desa Sindangmukti yang Mengalami Kendala Sarana Pengolahan Sampah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas)*, 1(1), 9-16.
- Purwendah, E. K. (2019). Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(2), 139-151.
- Puspita, L. (2019). Law Enforcement Model in Community Based Waste Monitoring and Management as a Realization of Good Environmental Governance Principle in Wast Sumatra, Indonesia. *nifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6((1)), 1- 6.
- Puspita, L. (2019). Law Enforcement Model in Community Based Waste Monitoring and Management as a Realization of Good Environmental Governance Principle in Wast Sumatra, Indonesia. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6((1)), 1- 6.
- Sarwono. (2020, July Monday). Penanganan Sampah di Kabupaten Ciamis.
- Satria, A. P. (2019). Environmental Quality Protection in the Period of Industrialization to Realize Environmental Based Industry. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6((2)), 156 – 163.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

**3. Bukti Konfirmasi Submit Revisi Pertama, Respon
Kepada Reviewer, dan Artikel yang Diresubmit
(3 Mei 2021)**

1. *Kurang relevan dengan pembahasan, karena pembahasan lebih banyak mengarah pada penegakan hukum*

Tanggapan:

Perbaiki judul sesuai dengan isi artikel

Faktor-Faktor Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sampah untuk Mewujudkan Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat

2. *Unsur dari sebuah abstrak adalah meliputi latarbelakang, permasalahan, metode penelitian dan hasil penelitian*

Tanggapan:

Perbaiki abstrak

Isu lingkungan merupakan hal yang menarik terkait dengan keberlangsungan bumi, sampah merupakan kendala apabila tidak diberdayakan juga mempunyai potensi untuk mencegahnya kerusakan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang berbasis nilai keadilan ekologis untuk mewujudkan kelestarian alam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan data primer wawancara dan observasi dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sampah, penelitian dilakukan di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah di Ciamis dalam pengelolaan sampah sudah dilengkapi dengan peraturan daerah, aparat pemerintah, sarana prasarana dan partisipasi masyarakat serta inovasi program yaitu pilah sampah, bank sampah, maggot dan sedekah sampah. Simpulannya bahwa kebijakan pemerintah daerah khususnya di Kuningan perlu adanya perbaikan terkait dengan optimalisasi peran pemerintah dalam kelembagaan dan pendanaan pengelolaan sampah dan peningkatan edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang baik dapat mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

3. *Tidak tampak adanya gap antara data exis dengan urgensi Perda atau kebijakan Pemda lainnya dalam pengolahan sampah*

Tanggapan:

Perbaiki

Pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena daerah-daerah kabupaten atau kota juga mengalami berbagai hambatan. Salah satu hal yang menjadi

kendala adalah yang terkait dengan penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan, terutama dalam penerapan sanksinya

4. *Dalam latar belakang ini belum tampak permasalahan yang akan diangkat sesuai dengan Judul atau tema.*

Tanggapan:

Pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena daerah-daerah kabupaten atau kota juga mengalami berbagai hambatan. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah yang terkait dengan penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan, terutama dalam penerapan sanksinya

5. *Perjelas mengapa menggunakan metode ini karena kenyataannya metode ini sangat jarang digunakan dalam penelitian hukum. Kemudian jelaskan juga konsep dari kedua metode penelitian tersebut.*

Tanggapan:

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu penelitian *deskriptif-analitis* dengan pendekatan *yuridis empiris*. Tahap dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan adalah data primer¹. Alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan sesi wawancara dengan masyarakat sekitar Kuningan dan Ciamis, dengan instansi terkait, dan dengan beberapa pemangku kepentingan. Selain itu, observasi juga dilakukan langsung ke masyarakat sekitar. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder terkait. Di sini, bahan hukum utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan terkait lainnya². Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, dan artikel serta pendapat para ahli terkait kebijakan pemerintah di bidang

¹ Lona Puspita. (2019). Law Enforcement Model in Community Based Waste Monitoring and Management as a Realization of Good Environmental Governance Principle in West Sumatra, Indonesia. Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 6((1)), 1- 6

² Suwari Akhmaddhian. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1-35

pengelolaan sampah dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem kemudian Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

6. *Metode kuantitatif pengumpulan datanya pasti melalui qusioner dan tabulasi data, dalam metode yang dituliskan ini tidak ditemukan.*

Tanggapan:

Sudah diperbaiki

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu penelitian *deskriptif-analitis* dengan pendekatan *yuridis empiris*. Tahap dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan adalah data primer³. Alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan sesi wawancara dengan masyarakat sekitar Kuningan dan Ciamis, dengan instansi terkait, dan dengan beberapa pemangku kepentingan. Selain itu, observasi juga dilakukan langsung ke masyarakat sekitar. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder terkait. Di sini, bahan hukum utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan terkait lainnya⁴. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, dan artikel serta pendapat para ahli terkait kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan sampah dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem kemudian Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

7. *Tambahkan penjelasan mengenai pembuktian bahwa kebijakan pemda penting untuk mendorong efektifitas pengelolaan sampah ...dst, jadi ada analisis antara ada dan tidak ada kebijakan pemda pengolahan sampah, sehingga bisa tampak efektifitasnya*

Tanggapan:

Sudah ditambahkan

Berdasarkan analisis teori tersebut argumentasi penulis yaitu bahwa perlu adanya suatu ketegasan dan kebijakan dari daerah maupun pusat mengenai penegakan hukum karena paradigma masyarakat masih menganggap enteng persoalan sampah dan peraturan yang

³ Lona Puspita. (2019). Law Enforcement Model in Community Based Waste Monitoring and Management as a Realization of Good Environmental Governance Principle in Wast Sumatra, Indonesia. Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 6((1)), 1- 6

⁴ Suwari Akhmaddhian. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1-35

mengaturinya, *mindset* masyarakat yaitu tidak akan begitu saja di hukum hanya karena persoalan sampah, kelemahan dari kelima faktor penegakan hukum tersebut berada pada peran penegak hukum dalam melaksanakan peraturan yang sudah di tetapkan kurang efektif karena masih jarang terlihat adanya sosialisasi mengenai peraturan tentang pengelolaan sampah padahal itu sangat penting dan kemungkinan akan mempengaruhi pola perilaku masyarakat, jika sosialisasi mengenai peraturan dan pengelolaan sampah dapat berjalan efektif tentunya paradigma msyarakatpun akan berubah karena merasa terikat oleh peraturan dan akan takut untuk melakukan kesalahan terlebih dalam hal pembuangan maupun pengelolaan sampah, kemudian kelemahan selanjutnya adalah ada pada sarana dan prasarana yang masih minim karena keterbatasan anggaran hal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan sampah, selain peran masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sarana dan prasarana pun sebagai penunjang pengelolaan sampah harus di utamakan dengan kata lain sarana dan prasarana adalah senjata dalam memerangi sampah. Kemudian teori tersebut memiliki kelemahan dalam hal faktor masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan masih menjadi kendala dalam penegakan hukum. Perbaikan perlu dilakukan pada factor regulasi, sarana prasarana dan budaya masyarakat.

8. *Tidak sinkron dengan judul, yaitu mengenai efektifitas dst... harusnya di kesimpulan sudah langsung terjawab bagaimanakah efektifitasdst*

Tanggapan:

Pengaturan pengelolaan sampah di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Kabupaten Kuningan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengeolaan Sampah serta Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagai Pelaksananya sedannngkan di Kabupaten Ciamis yaitu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kabupaten Ciamis sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pengembangan teknologi pengelolaan sampah organik dikelola dengan bekerja sama dengan Kelompok Tani Rumpaka Alam dengan pengembangan padi organic, program lainnya yaitu pilah sampah, bank sampah, maggot dan sedekah smpah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Kuningan maupun Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten perbandingan memang terlihat masih banyak kekurangan terutama pada faktor sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah serta masih minimnya kesadaran masyarakat terkait

penanganan sampah menjadi masalah bahkan, karena sampah dapat berpengaruh terhadap kesehatan, kebersihan, keindahan lingkungan. Bahwa dengan pengelolaan sampah berbasis inovasi seperti pilah sampah, bank sampah, perberedayaan maggot dan sedekah sampah merupakan inovasi yang bertujuan merubah sampah dari beban menjadi sumber pemasukan dan sumber ekonomi baru sehingga apabila pengelolaan sampah dilakukan dengan baik selain lingkungan lestari juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi terkait pengelolaan saat ini belum melibatkan Pemerintah Desa secara optimal terutama terkait dengan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dan pendanaan pengelolaan sampah sehingga perlu adanya perbaikan regulasi terkait peran Pemerintah Desa dalam pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga pengelolaan sampah dapat bersumber dari berbagai sumber Anggaran serta edukasi kepada masyarakat luas terkait peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mengelola sampah sehingga yang awal mulanya sampah adalah beban menjadi berkah.

Faktor-Faktor Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sampah untuk Mewujudkan Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Suwari Akhmaddhian^{1*}, Ria Virigianti¹ dan Erga Yuhandra¹

¹Faculty of Law, Universitas Kuningan, 45512. Indonesia

*Corresponden Email: suwari_akhmad@uniku.ac.id

ABSTRACT

Isu lingkungan merupakan hal yang menarik terkait dengan keberlangsungan bumi, sampah merupakan kendala apabila tidak diberdayakan juga mempunyai potensi untuk mencegahnya kerusakan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang berbasis nilai keadilan ekologis untuk mewujudkan kelestarian alam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan data primer wawancara dan observasi dan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sampah, penelitian dilakukan di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah di Ciamis dalam pengelolaan sampah sudah dilengkapi dengan peraturan daerah, aparat pemerintah, sarana prasarana dan partisipasi masyarakat serta inovasi program yaitu pilah sampah, bank sampah, maggot dan sedekah sampah. Simpulannya bahwa kebijakan pemerintah daerah khususnya di Kuningan perlu adanya perbaikan terkait dengan optimalisasi peran pemerintah dalam kelembagaan dan pendanaan pengelolaan sampah dan peningkatan edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang baik dapat mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pengelolaan Sampah; Kesejahteraan Masyarakat.

INTRODUCTION

Lingkungan yang sehat dan baik merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi dan tujuan bernegara. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya¹. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dimana definisi sampah adalah bahan yang tidak diperlukan atau sisa dari keperluan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat². Pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia berimplikasi langsung pada pengelolaan lingkungan hidup. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 305,65 juta pada tahun 2035, dan 75 persen tinggal di perkotaan³. Kondisi ini menuntut para pemangku

¹ Rosita Candrakirana. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta. *Yustisia*, 4(3), 581-601

² Suwari Akhmaddhian. (2020). Regional Government Policy in Environmental-Based Waste Management. *Advances in Economics, Business and Management Research*. Volume 140, May 2020, p. Volume 140. Semarang: Atlantis Press

³ Enny Agustina. (2019). The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the Regional Autonomy Era. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 34-39



kepentingan untuk membuat kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi⁴ sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Adapun sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Selama ini, pengelolaan sampah pada kawasan perkotaan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah yang tinggi, kepedulian masyarakat (*human behaviour*) yang masih rendah, serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir. **Pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena daerah-daerah kabupaten atau kota juga mengalami berbagai hambatan. Salah satu hal yang menjadi kendala adalah yang terkait dengan penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan, terutama dalam penerapan sanksinya⁵.**

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis merupakan tantangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pengelolaan sampah yang tepat dan berwawasan lingkungan belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Dari berbagai masalah yang ada, dapat diidentifikasi dua hal yang penting, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sampah dan sanksi hukumnya belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik dan Kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang tepat dan berwawasan lingkungan masih rendah⁶. (Iskandar, 2019) Pengelolaan sampah yang baik akan menghasilkan lingkungan hidup yang lestari sesuai dengan tujuan konstitusi negara Indonesia adalah mendapatkan lingkungan sehat dan baik⁷ (Akhmaddhian, The government policy on the conservation of natural resources and ecosystems in Kuningan, Indonesia, 2019)

Persoalan sampah di Kabupaten Kuningan saat ini makin serius untuk ditangani karena dalam sehari sampah yang dihasilkan warga hampir mencapai 400 ton. Baik limbah rumah tangga maupun yang dihasilkan dunia usaha. Sementara pengangkutan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciniru terkendala armada yang jumlahnya tidak seimbang, sampah-sampah tersebut masih didominasi plastik yang sangat sulit untuk diurai. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengurai sampah plastik yang jumlahnya mencapai ratusan ton tersebut. Dari 400 ton tersebut yang bisa tercover oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya 70 ton sampah, sisanya

⁴ Ibid

⁵ Octo Iskandar. (2019). Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan di Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. *Jurnal Abdimas*, Juni(2), 110-121

⁶ Ibid

⁷ Suwari Akhmaddhian. (2019). The Government Policy on the Conservation of Natural Resources and Ecosystems in Kuningan, Indonesia. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* Bandung: IOP

sebanyak 330 ton sampah di Kuningan tidak terurai, ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah dalam mengatasinya⁸

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten yang diprioritaskan menjadi pusat pengembangan pengolahan limbah sampah. Program pengolahan sampah di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Ciamis didasari oleh tingginya produksi sampah masyarakat pada berbagai kalangan, baik sampah industri, maupun sampah domestik rumah tangga. Pengolahan sampah di Kabupaten Ciamis sangat diperlukan mengingat akan terbatasnya prasarana dan sarana pengolahan sampah yang ada di daerah sekitar yang tidak mampu memuat pengolahan sampah yang ada. Data dari Dinas Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Ciamis tahun 2016 menunjukkan bahwa minimnya tempat pengolahan sampah akhir dan minimnya pengetahuan warga akan pemilahan sampah (organik dan anorganik)⁹.

METHOD

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu penelitian *deskriptif-analitis* dengan pendekatan *yuridis empiris*. Tahap dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan adalah data primer¹⁰. Alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan sesi wawancara dengan masyarakat sekitar Kuningan dan Ciamis, dengan instansi terkait, dan dengan beberapa pemangku kepentingan. Selain itu, observasi juga dilakukan langsung ke masyarakat sekitar. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder terkait. Di sini, bahan hukum utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan terkait lainnya¹¹. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, dan artikel serta pendapat para ahli terkait kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan sampah dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem kemudian Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

ANALYSIS AND DISCUSSION

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Nilai Keadilan Ekologis di Kabupaten Ciamis sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, letaknya di

⁸ Suwari Akhmaddhian. (2020). Regional Government Policy in Environmental-Based Waste Management. *Advances in Economics, Business and Management Research*. Volume 140, May 2020, p. Volume 140. Semarang: Atlantis Press

⁹ Muji Adi Mujiono. (2018). Iptek Bagi Masyarakat dalam Mengembangkan Kawasan Sadar Lingkungan di Desa Sindangmukti yang Mengalami Kendala Sarana Pengolahan Sampah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas)*, 1(1), 9-16

¹⁰ Lona Puspita. (2019). Law Enforcement Model in Community Based Waste Monitoring and Management as a Realization of Good Environmental Governance Principle in West Sumatra, Indonesia. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1-6

¹¹ Suwari Akhmaddhian. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-35

sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Banjar dan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat – Provinsi Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis – Cirebon – Jawa Tengah¹²

Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 terbagi menjadi 27 Kecamatan, 257 Desa, 7 Kelurahan, 1.225 Dusun, 8.747 Rukun Warga (RW) dan 2.825 Rukun Tetangga (RT). Di Kabupaten Ciamis jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Panawangan sebanyak 18 desa dan jumlah desa terkecilnya terdapat di Kecamatan Cimaragas, Ciamis, dan Sukamantri masing-masing sebanyak 5 desa. Jumlah Rukun Tetangga (RT) Kecamatan Rancah menduduki peringkat pertama sebanyak 194 RT. Jumlah PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebanyak 10.676 orang pada Tahun 2018. Proyeksi penduduk bertujuan sebagai informasi untuk pengambilan kebijakan di masa datang untuk memperoleh informasi penduduk dengan mengasumsikan tahun mendatang. Proyeksi Penduduk Kabupaten Ciamis dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut, Tahun 2010 penduduk Kabupaten Ciamis sebanyak 1.135.700 jiwa, hasil proyeksi Tahun 2019 sebanyak 1.195.200 jiwa¹³.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menangani masalah sampah menjadi bahan rujukan bagi Kabupaten atau kota lain di Jawa Barat, salah satunya Kabupaten Kuningan. Bahkan dari Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah melakukan studi banding ke Ciamis terkait pengelolaan sampahnya. Saat kabupaten Ciamis dijadikan lokasi studi banding, bukan berarti Kabupaten Ciamis bebas dari permasalahan sampah bahkan produksi sampahnya cukup besar diperkirakan mencapai 560 ton perhari. Seperti Kabupaten Kuningan, sebagian produksi sampah terbesar berasal dari sampah rumah tangga. Kabupaten Ciamis memiliki 2 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), diantaranya¹⁴:

- a. Tempat Pemrosesan Akhir Handapherang, Kecamatan Cijeungjing yang memiliki luas total 9 Ha, yang baru dimanfaatkan untuk pembuangan sampah dan fasilitas lainnya baru sekitar 3 Ha. Namun pada tahun 2018 TPA handapherang resmi di tutup total, penutupan tersebut merupakan dampak dari proyek pembangunan bendungan leuwikeris, karena lokasi TPA Handapherang berada tidak jauh dari sungai Citanduy, kemudian untuk aktifitas pembuangan sampah di pindah ke TPA Sindangrasa, kendala yang dihadapi yaitu karena jarak ke TPA Sindangrasa terlalu jauh mencapai 40 kilometer dari Kota Ciamis, kendala lainnya keterbatasan armada.

¹² BPS. (2019). Kabupaten Ciamis. Ciamis: BPS Ciamis

¹³ Adhi Putra Satria. (2019). Environmental Quality Protection in the Period of Industrialization to Realize Environmental Based Industry. Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 156 – 163

¹⁴ Sarwono. (2020, July Monday). Penanganan Sampah di Kabupaten Ciamis

- b. Tempat Pemrosesan Akhir Sindangrasa, Kecamatan Banjaranyar didirikan pada tahun 2017, memiliki luas 3,40 Hektar. Jumlah sampah yang dapat dikelola 34 ton perhari, untuk sistem operasi yang digunakan di TPA Sindangrasa adalah *sanitary landfill*, TPA Sindangrasa memiliki fasilitas penunjang yang cukup lengkap terdapat sumur pantau dan lindi. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah organik dikelola dengan bekerja sama dengan Kelompok Tani Rumpaka Alam dengan pengembangan padi organik.

Kabupaten Ciamis memiliki visi 2020 menuju Ciamis bebas sampah (*Zero Waste*). Untuk dapat mewujudkan visi tersebut Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah mengembangkan program sebagai berikut¹⁵:

- a. Pilah sampah dari rumah, program ini berjalan dengan baik karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Ciamis sudah menerapkan pilah sampah dari rumah sebelum di buang, hal itu terlihat dari tidak adanya sampah yang berserakan di sekitar wilayah Kota Ciamis, perumahan, perkantoran, pertokoan dan fasilitas umum lainnya.
- b. Bank Sampah, untuk sampah non organik dari rumah tangga juga di kumpulkan dan disetorkan ke Bank Sampah sehingga menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat dan nantinya akan dikelola dengan prinsip 3R sehingga dapat bernilai ekonomis. Jumlah bank sampah di Kabupaten Ciamis sebanyak 120 dan ada penambahan 1 bank sampah induk yang baru diresmikan bulan juni 2020, bank sampah Ciamis ini berlokasi di Jalan Mr. Iwa Somantri Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis.
- c. Melakukan pembudidayaan dengan memanfaatkan *Black Soldier Fly* (BSF) atau Maggot, Maggot BSF (*Black Soldier Fly*) adalah larva atau biasa disebut belatung dari jenis lalat besar berwarna hitam yang terlihat seperti tawon. Maggot BSF adalah bentuk dari siklus pertama (larva) lalat hitam yang nantinya bermetamorfosa menjadi lalat dewasa. Para peternak burung, ayam, ikan, hingga lele biasanya akan memberi makan ternaknya dengan pelet, namun maggot memiliki kandungan protein tinggi yang bisa dijadikan alternatif pakan ternak. Pembudidayaan belatung ini juga menggunakan media sampah organik yang dapat mengurangi suplai sampah organik yang selama ini terkadang menjadi permasalahan lingkungan. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai budidaya maggot, karena ini merupakan salah satu cara untuk menangani limbah sampah organik dengan merubahnya menjadi pakan ternak bahkan sejumlah petani ternak ikan di wilayah Pawindan, Panumbangan dan Banjaranyar sudah mulai menjalankan budidaya maggot, untuk cara pembudidayaannya cukup mudah yaitu simpan bibit telur maggot di kolam

¹⁵ Ibid

kecil berisi sampah organik yang busuk, lalu biarkan selama 18 hari, maggot siap dipanen, jika ingin di budidayakan biarkan maggot jadi kepompong kemudian berubah menjadi lalat dewasa.

- d. Sedekah sampah, petugas dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis sudah menyediakan keranjang sedekah sampah di beberapa fasilitas umum, masyarakat akan memasukan sampah anorganik seperti botol bekas minuman, gelas plastik dan sebagainya ke keranjang sedekah sampah, kemudian petugas akan mengambil keranjang tersebut ke bank sampah untuk di konversi dengan uang, selanjutnya akan di setorkan ke Badan Amil Zakat Kabupaten Ciamis. Program ini dapat membantu mengurangi sampah karena masyarakat dapat menyumbangkan sampah sambil beramal sehingga lingkungan sekitar terlihat bersih dan asri.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil analisis penelitian di lapangan yaitu¹⁶:

- a. Faktor hukumnya yaitu undang-undang, dalam pengaturan perundang-undangan di Indonesia terkait pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan berbagai peraturan penunjang lainnya termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, sudah maksimal mengatur mulai dari ruang lingkup pengelolaan sampah, asas dan tujuan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, jasa pelayanan sampah, ketentuan perizinan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan larangan, dan berbagai ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah
- b. Penegak Hukum, yaitu PPNS, polisi, hakim, jaksa, satpol PP. Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup belum merata dan menyeluruh antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, proses sosialisasi terhadap masyarakat baik itu tentang Peraturan Daerah maupun tentang penanganan sampah. Pemerintah Kabupaten Kuningan berusaha menawarkan konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menerapkan prinsip 3R (*Recycle, Reuse* dan *Reduce*) melalui kegiatan Kuningan pembentukan kelompok bank sampah kepada beberapa desa atau kelurahan di Kabupaten

¹⁶ Soerjono Soekanto. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers

Kuningan namun belum merata, diikuti komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dari sisi pendanaan kegiatan awal untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan. Proses sosialisasi sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah meliputi proses penyampaian ide/gagasan dari pemerintah kepada masyarakat, yang diwakili oleh pengurus RT/RW, Kader Lingkungan, pengurus PKK, tokoh masyarakat, dan tokoh keagamaan. Selanjutnya sosialisasi kepada warga masyarakat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, misalnya disampaikan dalam pertemuan rutin PKK, pertemuan dasawisma, pengajian ibu-ibu, serta pertemuan isidental antara warga dan pengurus RT/RW yang khusus membahas sosialisasi teknis pengelolaan sampah. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sudah maksimal dan terus melakukan pembenahan di bidang pengelolaan sampah, sosialisasi terus diupayakan sehingga masyarakat sudah mulai terbiasa dengan memilah sampah dari rumah ataupun ikut serta dalam pengelolaan sampah melalui program-program pengelolaan sampah.

- c. Faktor Sarana dan Fasilitas penunjang pengelolaan sampah, baik itu di Kabupaten Kuningan maupun Kabupaten Ciamis sarana prasarana dalam pengelolaan sampah belum cukup memadai terutama pada anggaran. Namun yang menjadi permasalahan utama adalah Tempat Pemrosesan Akhir di Ciniru Kabupaten Kuningan masih menggunakan sistem operasi *open dumping*, sistem operasi tersebut sebetulnya sudah tidak diperbolehkan di Indonesia berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sindangrasa Kabupaten Ciamis sudah menggunakan sistem operasi *Sanitary Landfill*.
- d. Faktor Masyarakat, keberhasilan suatu peraturan tergantung pada masyarakatnya. Di Kabupaten Kuningan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan dan mengelola sampah masih kurang, hal ini terlihat pada kondisi sampah yang dibuang oleh masyarakat yang ditampung di TPS dan TPA masih tercampur, sehingga sampah yang berasal dari masyarakat dalam kondisi tercampur dalam perjalanannya sampai ke TPA tetap dalam kondisi tercampur. Sedangkan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Ciamis sudah menerapkan kebiasaan memilah sampah dari rumah dan aktif ikut serta bersama pemerintah dalam pengelolaan sampah.
- e. Faktor Kebudayaan, budaya masyarakat terlihat saat sudah disediakan tempat sampah 3R namun masih membuang sampah sembarangan. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan bentuk rasa bersyukur sebagai makhluk hidup yang harmoni dengan alam (Hartiwiningsih, 2018). Sikap mencintai lingkungan merupakan wujud penjelmaan dari sikap yang sesuai dengan landasan ideology negara Indonesia yaitu Pancasila¹⁷.

¹⁷Junaedi. (2019). The The Axiology of Pancasila in the Reconstruction of Legal Culture in Indonesia. Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 6((1)), 7-13

Berdasarkan analisis teori tersebut argumentasi penulis yaitu bahwa perlu adanya suatu ketegasan dan kebijakan dari daerah maupun pusat mengenai penegakan hukum karena paradigma masyarakat masih menganggap enteng persoalan sampah dan peraturan yang mengaturnya, *mindset* masyarakat yaitu tidak akan begitu saja di hukum hanya karena persoalan sampah, kelemahan dari kelima faktor penegakan hukum tersebut berada pada peran penegak hukum dalam melaksanakan peraturan yang sudah di tetapkan kurang efektif karena masih jarang terlihat adanya sosialisasi mengenai peraturan tentang pengelolaan sampah padahal itu sangat penting dan kemungkinan akan mempengaruhi pola perilaku masyarakat, jika sosialisasi mengenai peraturan dan pengelolaan sampah dapat berjalan efektif tentunya paradigma masyarakatpun akan berubah karena merasa terikat oleh peraturan dan akan takut untuk melakukan kesalahan terlebih dalam hal pembuangan maupun pengelolaan sampah, kemudian kelemahan selanjutnya adalah ada pada sarana dan prasarana yang masih minim karena keterbatasan anggaran hal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan sampah, selain peran masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sarana dan prasarana pun sebagai penunjang pengelolaan sampah harus di utamakan dengan kata lain sarana dan prasarana adalah senjata dalam memerangi sampah. Kemudian teori tersebut memiliki kelemahan dalam hal faktor masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan masih menjadi kendala dalam penegakan hukum. Perbaikan perlu dilakukan pada factor regulasi, sarana prasarana dan budaya masyarakat.

Keadilan lingkungan sebagai sebuah keadilan sosial berkaitan secara fungsional dan empiris dengan pembangunan berkelanjutan¹⁸. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhinya. Pengelolaan lingkungan yang baik bertujuan untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Bahwa dengan pengelolaan sampah berbasis inovasi seperti pilah sampah, bank sampah, perberedayaan maggot dan sedekah sampah merupakan inovasi yang bertujuan merubah sampah dari beban menjadi sumber pemasukan dan sumber ekonomi baru sehingga apabila pengelolaan sampah dilakukan dengan baik selain lingkungan lestari juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

CONCLUSION

Pengaturan pengelolaan sampah di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Kabupaten Kuningan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah serta Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagai Pelaksananya sedangkan di Kabupaten Ciamis yaitu Dinas Perumahan

¹⁸Elly Kristiani Purwendah. (2019). Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(2), 139-151

Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kabupaten Ciamis sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pengembangan teknologi pengelolaan sampah organik dikelola dengan bekerja sama dengan Kelompok Tani Rumpaka Alam dengan pengembangan padi organic, program lainnya yaitu pilah sampah, bank sampah, maggot dan sedekah smpah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Kuningan maupun Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten perbandingan memang terlihat masih banyak kekurangan terutama pada faktor sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah serta masih minimnya kesadaran masyarakat terkait penanganan sampah menjadi masalah bahkan, karena sampah dapat berpengaruh terhadap kesehatan, kebersihan, keindahan lingkungan. Bahwa dengan pengelolaan sampah berbasis inovasi seperti pilah sampah, bank sampah, perberedayaan maggot dan sedekah sampah merupakan inovasi yang bertujuan merubah sampah dari beban menjadi sumber pemasukan dan sumber ekonomi baru sehingga apabila pengelolaan sampah dilakukan dengan baik selain lingkungan lestari juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi terkait pengelolaan saat ini belum melibatkan Pemerintah Desa secara optimal terutama terkait dengan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dan pendanaan pengelolaan sampah sehingga perlu adanya perbaikan regulasi terkait peran Pemerintah Desa dalam pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga pengelolaan sampah dapat bersumber dari berbagai sumber Anggaran serta edukasi kepada masyarakat luas terkait peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mengelola sampah sehingga yang awal mulanya sampah adalah beban menjadi berkah.

ACKNOWLEDGEMENT

The authors thank The researcher expressed their gratitude to the Directorate General Research and Development Strengthening Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia and Government of Kuningan Regency, for permission and encouragement to conduct such studies for the benefit of science and society.

REFERENCE

- Agustina, E. (2019). The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the Regional Autonomy Era. Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 6((1)), 34-39.
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1-35.
- Akhmaddhian, S. (2019). The government policy on the conservation of natural resources and ecosystems in Kuningan, Indonesia. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. Bandung: IOP

- Akhmaddhian, S. (2020). Regional Government Policy in Environmental-Based Waste Management. *Advances in Economics, Business and Management Research*. Regional Government Policy in Environmental-Based Waste Management. *Advances in Economics, Business and Management Research*. Volume 140, May 2020 , p. Volume 140. Semarang: Atlantis Press.
- BPS. (2019). Kabupaten Ciamis. Ciamis: BPS Ciamis.
- Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta. *Yustisia*, 4(3), 581-601.
- Hartiwiningsih. (2018). The public participation in water conservation to embody food security in Kuningan, Indonesia. *Int. J. of Civ. Engineering and Tech*, 9((4)), 254-264.
- Iskandar, O. (2019). Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan di Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. *Jurnal Abdimas*, Juni(2), 110-121.
- Junaedi. (2019). The The Axiology of Pancasila in the Reconstruction of Legal Culture in Indonesia. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6((1)), 7-13.
- Mujiono, M. A. (2018). Iptek Bagi Masyarakat dalam Mengembangkan Kawasan Sadar Lingkungan di Desa Sindangmukti yang Mengalami Kendala Sarana Pengolahan Sampah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas)*, 1(1), 9-16.
- Purwendah, E. K. (2019). Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(2), 139-151.
- Puspita, L. (2019). Law Enforcement Model in Community Based Waste Monitoring and Management as a Realization of Good Environmental Governance Principle in Wast Sumatra, Indonesia. *nifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6((1)), 1- 6.
- Puspita, L. (2019). Law Enforcement Model in Community Based Waste Monitoring and Management as a Realization of Good Environmental Governance Principle in Wast Sumatra, Indonesia. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6((1)), 1- 6.
- Sarwono. (2020, July Monday). Penanganan Sampah di Kabupaten Ciamis.
- Satria, A. P. (2019). Environmental Quality Protection in the Period of Industrialization to Realize Environmental Based Industry. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6((2)), 156 – 163.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

**4. Bukti Konfirmasi Artikel Accepted
(23 Mei 2021)**



Q aanaswari@umi.ac.id



99+

Tulis

Mail

Kotak Masuk

3.802

Chat

Berbintang

Ditunda

Spaces

Terkirim

Meet

Draf

Selengkapnya

Label

[SubstantiveJustice] Editor Decision Eksternal Kotak Masuk x



Aan Aswari, AAW <aanaswari@umi.ac.id>
kepada saya

Inggris

Indonesia

Terjemahkan pesan

Suwari Akhmaddhian (Author):

The editing of your submission, "The Law Enforcement Factors in Waste Management to Achieve Environmental Susta complete. We are now sending it to production.

Submission URL: <https://substantivejustice.id/index.php/sucila/authorDashboard/submission/109>

Aan Aswari, AAW
Universitas Muslim Indonesia
aanaswari@umi.ac.id

[Substantive Justice International Journal of Law](#)

**5. Bukti Konfirmasi Artikel Published
(30 Juni 2021)**

Law Enforcement Factors in Waste Management to Achieve Environmental Sustainability and Community Welfare

Suwari Akhmaddhian^{1Ω}, Ria Virigianti¹, dan Erga Yuhandra¹

¹Faculty of Law, Universitas Kuningan

^Ωemail corresponden: suwari_akhmad@uniku.ac.id

ABSTRACT

Environmental issues are interesting subjects that are related to the earth's sustainability. While Garbage is basically an obstacle, it also has the potential to prevent environmental damage and increase the community's economy if it is well managed. This research aims to analyze local government policies in waste management based on the value of ecological justice to achieve natural preservation. The research method used is qualitative with primary data from interviews and observations supported by laws and regulations related to waste management. The research was conducted in Kuningan Regency and Ciamis Regency. The results showed that the Ciamis local government policy in waste management was equipped with local regulations, government officials, infrastructure, community participation, and program innovation, namely waste sorting, waste bank, maggot, and garbage alms. The conclusion is that local government policies, especially in Kuningan, still need improvement related to optimizing the role of the local government in institutional and funding of waste management and increasing public education regarding waste management. Good waste management can create environmental sustainability and community welfare.

Keywords: *Law Enforcement; Waste management; Community Welfare;*

Date of Submission: December 18, 2020

Date of Publication: May 19, 2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i1.109>

INTRODUCTION

A healthy and good environment is one of the goals of governance that is in line with the constitution. Waste is one of the environmental problems which has not been managed properly, especially in developing countries, while the ability of waste management is often not balanced with its production¹. According to Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, the definition of waste is material that is not needed or leftover from daily needs and/or natural

¹ Candrakirana, R. (2015). Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance di kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), pp. 581-601, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8690>



processes in solid form.² The rapid growth of Indonesia's population has direct implications for environmental management. The National Development Planning Agency (Bappenas) and the Central Statistics Agency (BPS) estimate that Indonesia's population in 2035 will reach 305.65 million by 2035, of which 75 percent live in urban areas³. This condition requires stakeholders to make good spatial planning and environmental management policies. According to Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, the definition of waste is the remains of human daily activities and/or natural processes in solid form.⁴ Meanwhile, waste management is a systematic, comprehensive, and sustainable activity that includes waste reduction and handling. Meanwhile, household waste comes from daily activities in the household which do not include feces and specific waste. So far, waste management in urban areas is faced with quite complex problems. These problems include the high rate of waste dumping, low human behavior, and problems with final disposal activities. Waste management has become a crucial problem because regencies or cities also experience various obstacles. One of the obstacles is related to the application and enforcement of the law in waste management which is part of environmental law enforcement, especially in the application of sanctions.⁵

The management of household waste and similar waste is a challenge for the central government, local governments, businesses, and the community.⁶ Proper and environmentally friendly waste management has not been fully realized. From the various problems that exist, two important things can be identified, namely, the various laws and regulations related to waste management and the legal sanctions that have not been fully socialized and awareness and knowledge about proper and environmentally sound waste management are still low.⁷ following the intentions of the Indonesian constitution, which is to have a healthy and good environment.⁸

The problem of waste in Kuningan Regency is currently getting more serious to deal with because in a day the garbage produced by residents is almost 400 tons. Both household waste and those generated by business activities. Meanwhile, the transportation of waste at the Ciniru Final Processing Site (TPA) is hampered by an unbalanced fleet, the waste is still dominated by plastic which is very difficult to decompose. It takes a long time to break down hundreds of tons of plastic waste. Of the 400 tonnes of waste, only about 70 tonnes can be managed by the

² Akhmaddhian, S., Sunarsah, N., & Dialog, B. L. (2020, May 20). *Regional Government Policy in Environmental-Based Waste Management*. [International Conference on Law, Economics and Health] (ICLEH 2020). pp. 261-266. Atlantis Press <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.053>

³ Agustina, E. (2019). The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the Regional Autonomy Era. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), pp. 34-39. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1483>

⁴ *Ibid*

⁵ Iskandar, O., & Kurniawan, R. (2019). Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. *UNES Journal of Community Service*, 4(1), pp. 16-22.

⁶ Hajkowicz, S. A., Cook, H., & Littleboy, A. (2012). Our Future World: Global megatrends that will change the way we live. The 2012 Revision. *Canberra: CSIRO*. <https://core.ac.uk/download/pdf/30678436.pdf>

⁷ *Ibid*

⁸ Akhmaddhian, S., Hartiwingsih, H., Handayani, I. G., Yuhandra, E., Rahmat, D., & Syafrudin, O. (2018, July 2-4). *The Government Policy on the Conservation of Natural Resources and Ecosystems in Kuningan, Indonesia*. [In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science] 311(1), 012048. pp. 1-6. IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/311/1/012048>

Environment Agency, the remaining 330 tonnes of waste in Kuningan is not decomposed. This problem is something that must be addressed by local governments.⁹

Ciamis Regency is one of the districts that is prioritized as a center for the development of waste processing. The waste processing program in several regions in Indonesia, including in Ciamis Regency, is based on the high production of community waste in various groups, both industrial waste, and household domestic waste. Waste processing in Ciamis Regency is very necessary considering the limited infrastructure and waste processing facilities in the surrounding area that are unable to contain existing waste processing. Data from the Cleanliness and City Planning Office of Ciamis Regency in 2016 shows that there is a lack of waste processing facilities and the lack of knowledge of residents about sorting waste (organic and inorganic)¹⁰.

METHOD

The research specification used is descriptive-analytical research with an empirical juridical approach. The stages in this research are field research and library research. In empirical legal research, the data used are primary data¹¹. data collection instruments using interview guidelines and document study. Data analysis using descriptive analysis method. Primary data collection was carried out by conducting interview sessions with communities around Kuningan and Ciamis, with related agencies, and with several stakeholders. In addition, observations were also carried out directly to the surrounding community. Meanwhile, secondary data was obtained by conducting literature studies on the collection of related primary and secondary legal materials. Here, the main legal ingredients are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 18 of 2008 on Waste Management, and other related regulations¹². Meanwhile, secondary legal materials in the form of books, magazines, scientific papers, and articles as well as opinions from experts related to government policies in the field of waste management and conservation of natural resources and ecosystems. Then the data analysis uses descriptive analysis methods.

ANALYSIS AND DISCUSSION

Implementation of Local Government Policies in Waste Management Based on Ecological Justice Values in Ciamis Regency as one of the districts in West Java Province, located in the north bordering Majalengka and Kuningan Regencies. In the west, it is bordered by

⁹ Suwari Akhmaddhian. (2020 May 20). *Loc.Cit*

¹⁰ Mujiono, M. A., Rahmawati, A. Y., Azhari, D. N., Fitria, N. F. N., Indria, R. R., & Witarsa, R. (2019). Iptek Bagi Masyarakat Dalam Mengembangkan Kawasan Sadar Lingkungan Di Desa Sindangmukti Yang Mengalami Kendala Sarana Pengolahan Sampah. *Abdimas Siliwangi*, 1(1), pp. 9-16. <http://dx.doi.org/10.22460/as.v1i1p9-16.35>

¹¹ Puspita, L. (2019). Law Enforcement Model In Community-Based Waste Monitoring And Management As A Realization Of Good Environmental Governance Principles In West Sumatera, Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), pp. 1-6. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1629>

¹² Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). pp. 1-35. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>

Tasikmalaya Regency and Tasikmalaya City, in the east by Banjar City and Central Java Province, and in the south with Pangandaran Regency. Based on its geographical location, Ciamis Regency is in a strategic position that is traversed by the National road across West Java Province - Central Java Province and the provincial road crossing Ciamis - Cirebon - Central Java.

The Administrative Region of the Ciamis Regency Government in 2018 is divided into 27 Districts, 257 Villages, 7 Kelurahan, 1,225 Hamlets, 8,747 Rukun Warga (RW), and 2,825 Rukun Tetangga (RT). In Ciamis Regency, the highest number of villages is in Panawangan District with 18 villages and the smallest number of villages are in Cimaragas, Ciamis, and Sukamantri Districts, each with 5 villages. The number of Rukun Tetangga (RT) in Rancah Subdistrict was in the first rank of 194 RT. The number of civil servants in the Regional Government of Ciamis Regency was 10,676 people in 2018. Population projections are intended as information for future policy making to obtain population information by assuming the coming year. The population projection of Ciamis Regency from 2010 to 2019 is as follows, in 2010 the population of Ciamis Regency was 1,135,700 people, the projection results for 2019 were 1,195,200 people.¹³

The success of the Ciamis Regency Government in dealing with waste problems has become a reference material for other districts or cities in West Java, one of which is Kuningan Regency. The Kuningan Regency Government has even conducted a comparative study to Ciamis regarding its waste management. Even though Ciamis Regency is used as a location for a comparative study, it does not mean that it is free from waste problems. In fact, the waste production is large enough to be estimated at 560 tons per day. Most of the largest waste production comes from household waste. Ciamis Regency has 2 Final Processing Sites (TPA), among them:

- a. The Handapherang Final Processing Site, Cijeungjing District, which has a total area of 9 hectares, which has only been used for garbage disposal and other facilities, is only about 3 hectares. However, in 2018 the handapherang landfill was officially closed completely, this closure was the impact of the leuwikeris dam construction project, because the location of the TPA Handapherang is not far from the Citanduy river. The Sindangrasa TPA is too far to reach 40 kilometers from Ciamis City, another obstacle is the limited fleet.
- b. Sindangrasa Final Processing Site, Banjarnyar District was founded in 2017, has an area of 3.40 hectares. The amount of waste that can be managed is 34 tons per day, for the operating system used at the Sindangrasa TPA is a sanitary landfill, the Sindangrasa TPA has quite complete supporting facilities, including monitoring wells and leachate. The development of organic waste management technology is managed in collaboration with the Rumpaka Alam Farmer Group with the development of organic rice.

¹³ Satria, A. P. (2020). Environmental Quality Protection in the Period of Industrialization to Realize Environmental-Based Industry. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), pp. 156-163. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i2.1962>

Ciamis Regency has a 2020 vision towards zero waste Ciamis. To be able to realize this vision, the Government of Ciamis Regency, especially the Public Housing, Settlement Areas and Environment Services in waste management develops the following programs:

- a. Sorting waste from home, this program is running well because most of the people of Ciamis Regency have implemented waste sorting from their homes before throwing it away, this can be seen from the absence of garbage scattered around the Ciamis City area, housing, offices, shops, and other public facilities.
- b. The Waste Bank, for non-organic waste from households is also collected and deposited into the Garbage Bank so that it becomes additional income for the community and will later be managed with the 3R principle so that it can be of economic value. The number of waste banks in Ciamis Regency is 120 and there is an addition of 1 main waste bank which was just inaugurated in June 2020, this Ciamis waste bank is located on Jalan Mr. Iwa Somantri, Ciamis Village, Ciamis District.
- c. Cultivating using the Black Soldier Fly (BSF) or Maggot, Maggot BSF (Black Soldier Fly) is a larva or commonly called a maggot from a large black fly type that looks like a wasp. Maggot BSF is a form of the first cycle (larvae) of black flies which later metamorphose into adult flies. Breeders of birds, chickens, fish, and catfish usually feed their livestock with pellets, but maggots have a high protein content which can be used as an alternative to animal feed. This maggot cultivation also uses organic waste media which can reduce the supply of organic waste which has sometimes become an environmental problem. The Public Housing Service of the Residential Area and the Environment of Ciamis Regency continues to aggressively socialize to the community about maggot cultivation because this is one way to deal with organic waste by turning it into animal feed, even several fish farmers in the Pawindan, Panumbangan, and Banjaranyar areas have started. running maggot cultivation, for the cultivation method it is quite easy, namely storing maggot egg seeds in a small pond filled with rotten organic waste, then leave it for 18 days, the maggot is ready to be harvested, if you want to cultivate it, let the maggot become a cocoon then turn into an adult fly.
- d. Alms for garbage, officers from the Community Housing Service for Residential Areas and the Environment of Ciamis Regency have provided alms baskets for garbage in several public facilities, the community will put inorganic waste such as used drink bottles, plastic cups, and so on into the alms baskets, then the officers will take the baskets. to a waste bank to be converted into money, then it will be deposited to the Amil Zakat Agency of Ciamis Regency. This program can help reduce waste because people can donate garbage while doing charity so that the surrounding environment looks clean and beautiful.

Conceptually, the essence of law enforcement lies in the activity of harmonizing the relationship of values outlined in the principles and attitudes of action as a series of defining the

final stages of value to create and maintain social peace. Based on the theory of law enforcement the factors that influence law enforcement in Kuningan District and Ciamis Regency are based on the results of field research analysis, as follows:¹⁴

- a. Legal factors, that in the regulation of legislation in Indonesia related to waste management, namely Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and various other supporting regulations including Kuningan Regency Regional Regulation Number 4 of 2010 concerning Waste Management and Ciamis Regency Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Waste Management, has maximally regulated starting from the scope of waste management, principles and objectives, duties and authorities, rights and obligations, implementation of waste management, incentives and disincentives, cooperation and partnerships, waste services, licensing provisions, community participation, guidance, supervision and control, prohibition provisions, and various other provisions relating to waste management;
- b. Law Enforcement, namely civil servant investigators, police, judges, prosecutors, and civil service police units. The Kuningan Regency Government, in this case, the Environmental Service, has not been evenly distributed in socializing rural and urban communities, both regarding Regional Regulations and regarding waste management. The Kuningan Regency Government is trying to offer a community-based waste management concept that applies the 3R principle (Recycle, Reuse and Reduce) through the Kuningan activity of forming a waste bank group to several villages or sub-districts in Kuningan Regency but it has not been evenly distributed, followed by the commitment of the Kuningan Regency Government in terms of funding the initial activities for the procurement of equipment and supplies. The socialization process before carrying out waste management activities includes the process of conveying ideas/ideas from the government to the community, represented by RT / RW administrators, environmental cadres, PKK administrators, community leaders, and religious leaders. Furthermore, socialization to community members is carried out through various forms of activities, for example, delivered in routine PKK meetings, dasawisma meetings, recitation of women, as well as incidental meetings between residents and RT / RW administrators specifically discussing technical socialization of waste management. meanwhile, the Ciamis Regency Government, in this case, the Public Housing, Settlement Areas, and Environment Services, has done its best and continues to make improvements in the waste management sector. Efforts have been made to continue socialization so that people are getting used to sorting waste from their homes or participating in waste management through waste management programs;
- c. Factors of facilities to support waste management, both in Kuningan District and Ciamis Regency, the infrastructure for waste management is insufficient, especially on the budget.

¹⁴ Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

However, the main problem is the Final Processing Site in Ciniru, Kuningan Regency still uses the open dumping operating system, the operating system is not permitted in Indonesia based on Article 44 of Law Number 18 Year 2008 concerning Waste Management, while the Final Processing Site (TPA). Sindangrasa Ciamis Regency already uses the Sanitary Landfill operating system.

- d. Community factor, the success of regulation depends on the community. In Kuningan District, public awareness to care for the environment and manage waste is still lacking, this can be seen in the condition that the waste disposed of by the community which is collected in TPS and TPA is still mixed, so that the waste originating from the community is mixed on the way to the TPA. mixed. Meanwhile, most people in Ciamis Regency have adopted the habit of sorting waste from their homes and are actively participating with the government in waste management.
- e. Cultural factors, community culture can be seen when 3R trash bins have been provided, but many people still litter. Community participation in preserving the environment is a form of responsibility as a good citizen and a form of gratitude as a living being in harmony with nature.¹⁵ The attitude of loving the environment is a manifestation of an attitude that is following the foundation of the Indonesian state ideology, namely Pancasila.¹⁶

Based on the analysis above, there is a need for assertiveness and policies from both the regional and the central level regarding law enforcement because the paradigm of society still underestimates the problem of waste and the regulations that govern it. The public mindset thinks that they will not be punished just because of the waste problem. The weakness of the five law enforcement factors lies in the ineffective role of law enforcers in implementing existing regulations due to the lack of socialization regarding regulations regarding waste management. If the socialization of regulations and waste management can run effectively, of course, the community's paradigm will change because they feel bound by the regulations and will be afraid to make mistakes, especially in terms of waste disposal and waste management.¹⁷ The next weakness is that there are still minimal facilities and infrastructure due to budget constraints. This results in obstruction of the waste management process. In addition to the role of the community in creating a good and healthy living environment, facilities and infrastructure to support waste management must be prioritized. In short, facilities and infrastructure are weapons in fighting waste.¹⁸ The Lack of public awareness about protecting the environment is still an obstacle in law

¹⁵ Akhmaddhian, S., & Hartwiningsih, H. (2018). *Loc.Cit*

¹⁶ Junaedi, J. (2019). The Axiology of Pancasila in the Reconstruction of Legal Culture in Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), pp. 7-13. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1815>

¹⁷ Bui, T. D., Tsai, F. M., Tseng, M. L., Wu, K. J., & Chiu, A. S. (2020). Effective municipal solid waste management capability under uncertainty in Vietnam: utilizing economic efficiency and technology to foster social mobilization and environmental integrity. *Journal of Cleaner Production*, 259, 120981. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120981>

¹⁸ Scotford, E. (2013). Separate Waste Stream Collection and 'Best Environmental Outcomes'. *Environmental Law Review*, 15(4), pp. 293-300. p.299. <https://doi.org/10.1350/enlr.2013.15.4.196>

enforcement. Improvements need to be made to regulatory factors, infrastructure, and community culture.

Environmental justice as social justice is functionally and empirically related to sustainable development¹⁹. Sustainable development is a development that meets the needs of the present generation without reducing the ability of future generations to meet their needs. Good environmental management aims to keep the environment sustainable. Whereas with innovation-based waste management such as waste sorting, waste banks, maggot celebration and garbage charity, it is an innovation that aims to transform waste from a burden into a source of income and a new economic source so that if waste management is carried out properly in addition to a sustainable environment, it can also improve the welfare of the community.

CONCLUSION

The regulation of waste management in Indonesia, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2008 concerning Waste Management, is implemented in Kuningan district through Regional Regulation Number 4 of 2010 concerning Waste Management and the Regional Environmental Service. while in Ciamis Regency it is carried out by the Public Housing Service for Settlement Areas and the Environment through Ciamis Regency Regional Regulation Number 18 of 2008 concerning Solid Waste Management. The implementation of local government policies and the development of organic waste management technology is managed in collaboration between the Rumpaka Alam Farmer Group and the development of organic rice. In addition, there are other programs such as waste sorting, waste banks, maggot, and waste alms. Waste management in Kuningan District and Ciamis Regency as comparison districts does indeed show many shortcomings, especially in the factors of supporting facilities and infrastructure for waste management. Including the lack of public awareness regarding waste handling. Innovation-based waste management such as waste sorting, waste banks, maggot celebration, and garbage alms are innovations that aim to change waste from burdens into a source of income and a new economic source so that if waste management is carried out properly in addition to a sustainable environment it can also improve the welfare of the community. As a recommendation, waste management currently does not involve the Village Government optimally, especially in relation to the institutionalization of Village-Owned Enterprises and funding for waste management, so it is necessary to improve regulations regarding the role of the Village Government in funding sourced from the Village Revenue and Expenditure Budget. Thus, waste management can be sourced from various budget sources as well as providing education to the wider community related to increasing public legal awareness in managing waste.

¹⁹ Purwendah, E. K. (2019). Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), pp. 139-151. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>

ACKNOWLEDGEMENT

The authors expressed their gratitude to the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia and Government of Kuningan Regency, for permission and encouragement to conduct the studies for the benefit of science and society.

REFERENCE

- Agustina, E. (2019). The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the Regional Autonomy Era. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), pp. 34-39. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1483>
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). pp. 1-35. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
- Akhmaddhian, S., Hartiwiningsih, H., Handayani, I. G., Yuhandra, E., Rahmat, D., & Syafrudin, O. (2018, July 2-4). *The Government Policy on the Conservation of Natural Resources and Ecosystems in Kuningan, Indonesia*. [In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science] 311(1), 012048. pp. 1-6. IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/311/1/012048>
- Akhmaddhian, S., Sunarsah, N., & Dialog, B. L. (2020, May 20). *Regional Government Policy in Environmental-Based Waste Management*. [International Conference on Law, Economics and Health] (ICLEH 2020). pp. 261-266. Atlantis Press <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.053>
- Bui, T. D., Tsai, F. M., Tseng, M. L., Wu, K. J., & Chiu, A. S. (2020). Effective municipal solid waste management capability under uncertainty in Vietnam: utilizing economic efficiency and technology to foster social mobilization and environmental integrity. *Journal of Cleaner Production*, 259, 120981. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120981>
- Candrakirana, R. (2015). Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance di kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), pp. 581-601, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8690>
- Hajkowicz, S. A., Cook, H., & Littleboy, A. (2012). Our Future World: Global megatrends that will change the way we live. The 2012 Revision. *Canberra: CSIRO*. <https://core.ac.uk/download/pdf/30678436.pdf>
- Iskandar, O., & Kurniawan, R. (2019). Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. *UNES Journal of Community Service*, 4(1), pp. 16-22.
- Junaedi, J. (2019). The Axiology of Pancasila in the Reconstruction of Legal Culture in Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), pp. 7-13. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1815>

Mujiono, M. A., Rahmawati, A. Y., Azhari, D. N., Fitria, N. F. N., Indria, R. R., & Witarso, R. (2019). Iptek Bagi Masyarakat Dalam Mengembangkan Kawasan Sadar Lingkungan Di Desa Sindangmukti Yang Mengalami Kendala Sarana Pengolahan Sampah. *Abdimas Siliwangi*, 1(1), pp. 9-16. <http://dx.doi.org/10.22460/as.v1i1p9-16.35>

Purwendah, E. K. (2019). Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), pp. 139-151. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>

Puspita, L. (2019). Law Enforcement Model In Community-Based Waste Monitoring And Management As A Realization Of Good Environmental Governance Principles In West Sumatera, Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), pp. 1-6. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1629>

Satria, A. P. (2020). Environmental Quality Protection in the Period of Industrialization to Realize Environmental-Based Industry. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), pp. 156-163. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i2.1962>

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Scotford, E. (2013). Separate Waste Stream Collection and 'Best Environmental Outcomes'. *Environmental Law Review*, 15(4), pp. 293-300. <https://doi.org/10.1350/enlr.2013.15.4.196>